

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. (2015). Fungsi pengawasan dprd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12).
- Amrizal, dkk. (2013). Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten terhadap perizinan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(4).
- Anwar, K., dkk. (2015). Fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. (*Paper*), 5(2).
- Anwar, K. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Revisi Ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Creswell, J. (2012). *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed* (3 ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmadi, B. (2015). *Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan prinsip checks and balances (Studi kasus DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali)*. Tesis. UGM.
- Djauhari, A., R.. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Drazen, A., & Eslava, M. (2006). *Pork Barrel Cycles*. Working Paper, Seminar Participants at IIES-Stockholm University, Tel Aviv University.
- Ebyhara, A.B. (2014). *Pengantar Ilmu Politik* (Cetakan ke 2). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- GAMNA. (2014). *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh*. Banda Aceh: GAMNA Publising.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011). *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy* (Revisi Ed.). Malang: UB Press.

- Herizal. (2017). *Kinerja lembaga perwakilan rakyat di daerah otonomi khusus Aceh dalam melaksanakan fungsi legislasi*. Tesis. UMY
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hudiyanto. (2014). *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: EKPI-IPIEF UMY
- Iskandar, W., dkk. (2017). Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah di Kota Samarinda. *eJournal Administrative Reform*, 5(1).
- Johnson, J. K. (2015). *The Role of Parliament in Government*. Washington, D.C: World Bank Institute
- Faizal, L. (2011). Fungsi pengawasan DPRD di era otonomi daerah. *Jurnal TAPIS*, 7(13).
- Maryadi, S. (2015). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah (Studi pembahasan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK)*. Tesis. Universitas Terbuka
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2009). *Metodologi Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pratiwi, A., M., dkk. (2017). *Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2013 dan 2014*. Tesis. Universitas Bengkulu.
- Palenewen, J. D. O. (2014). *Penerapan patronase dalam kemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada pemilu legislatif Kota Bitung tahun 2009*. Tesis. UGM.
- Putri, F. S., dkk. (2016). Pengaruh personal background, political background dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2).
- Putri, R. A. L., dkk. (2017). Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Racbini, D. J. (2006). *Ekonomi Politik dan Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahri, M., dkk. (2014). *Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan*. Tesis. Universitas Brawijaya Malang.
- Sanit., A. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

- Saragintan, A., & Syahrul, H. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, 2(1).
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Suparno. (2016). *Model pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance (Studi di Kota Salatiga) periode 2014-2019*. Tesis. UMS.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Cetakan Ke 1). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke 16). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke 25). Bandung: Alfabeta.
- Suwanta, D. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Suwanta, D. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah Daerah yang Efektif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Taufik, dkk. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam pemberlakuan Perda di Kabupaten Luwu Utara. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 3(2).
- Tresnaningtyas, G. A., dkk. (2017). *Pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2016 tentang pemilihan, pengesahan dan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dalam pemilihan kepala desa di kabupaten Wonogiri*. Tesis. UMS.
- Yustika, A., E. (2014). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Cetakan ke III). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Perundang-undangan**

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi Dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya*

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik secara Gratis bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.*

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya*

Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 354 Tahun 2017 tentang *Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.*

### **Website / Media**

Koran Independen. (2017). *Listrik gratis Aceh Jaya untuk siapa.* Diakses pada 18 November 2018 dari <http://koranindependen.co/listrik-gratis-aceh-jaya-untuk-siapa.html>

Tribunnews. (2015). *DPRK Pertanyakan Listrik Gratis Berstiker PA.* Diakses pada 18 November 2018 dari <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/01/dprk-pertanyakan-listrik-gratis-berstiker-pa>.

Tribunnews. (2015). *Stiker PA Hanya Ditempel di Rumah Pendukung.* Diakses pada 18 November 2018 dari <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/03/stiker-pa-hanya-ditempel-di-rumah-pendukung>.

### **Sumber Lainnya**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Aceh Jaya. (2018). Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

Badan Pusat Statistik Aceh Jaya. (2018). Data Masyarakat Miskin Aceh Jaya 2014-2017.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya. (2018). Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017

Komisi Pemilihan Independen. (2018). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya 2014

Sekretariat DPRK Aceh Jaya. (2018). Daftar Perolehan Suara Anggota DPRK Periode 2014-2019

Sekretariat DPRK Aceh Jaya. (2015). Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

### **Wawancara**

Abdurrahman, Azhar. *Interview*. Bupati Aceh Jaya Periode 2012-2017 pada hari Rabu, 11 Juli 2018

Asrizal, Teuku. *Interview*. Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 pada hari Kamis, 02 Agustus 2018

Fajri. *Interview*. Ketua LSM Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Aceh Jaya pada hari Kamis, 28 Juni 2018

Ilham, Ayudi. *Interview*. Anggota DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar pada hari Sabtu, 04 Agustus 2018

Irwansyah. *Interview*. Kabag Biro Perekonmian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pemerintah Kabipaten Aceh Jaya pada hari Senin, 02 juli 2018

Jamin, Muhammad. *Interview*. Anggota DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 dari Fraksi Gabungan pada hari Selasa, 26 Juni 2018

Mawardi. *Interviwe*. Ketua LSM Koalisi Bersama Masyarakat (KIBAR) Aceh Jaya pada hari Senin, 30 Juli 2018

Musliadi Z. *Interview*. Ketua DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 pada hari Selasa, 17 juli 2018

Muslim. *Interview*. Ketua Forum GetjhiK Se-Aceh Jaya pada hari Rabu, 25 Juli 2018

Puteh, T. Hasyimi. *Interview*. Wakil Ketua II DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 Pada hari Senin, 16 Juli 2018

Safwandi. *Interview*. Ketua Komisi C DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Aceh pada hari Sabtu, 04 Agustus 2018

Saudi. *Interview*. Anggota DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Aceh pada hari Selasa, 26 Juni 2018

Suhelmi. *Interview*. Anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 dari Fraksi Gabungan pada hari Senin, 16 Juli 2018

Tirtana, Endang. *Interview*. Staf di Sekretariat DPRK Aceh Jaya pada hari Kamis, 02 Agustus 2018